

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN
PDRB PER KAPITA TERHADAP ANGKA PARTISIPASI KASAR PADA
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEDERAJAT
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

Richa Susyanthi



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2017

ABSTRAK

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP ANGKA PARTISIPASI KASAR PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEDERAJAT DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

Richa Susyanthi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan PDRB per kapita terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2005 -2015, yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan metode regresi linier berganda dengan alat analisis yang dipakai untuk mengolah data yaitu Program Eviews 6.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan dan PDRB per kapita, berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat di Kabupaten Lampung Timur. Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat di Kabupaten Lampung Timur.

Kata Kunci : Angka Partisipasi Kasar (APK), *Ordinary Least Square* (OLS), PDRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.

ABSTRACT

EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING AND EDUCATION SECTORS PDRB PER CAPITA PARTICIPATION RATE OF ROUGH ON THE HIGH SCHOOL (SMA) LEVEL EQUALS IN DISTRICT EAST LAMPUNG

By

Richa Susyanthi

The purpose of this research is to analyze the influence of government expenditure in the education sector and PDRB per capita on gross enrollment ratios at the high school level in East Lampung. This research used time series data from 2005 – 2015, obtained from the Department of Education Youth and Sports East Lampung District and the Central Statistics Agency (BPS).

The research method that used in this analysis is Ordinary Least Square (OLS), using analytical tools to process the data is Eviews 6.0 program. The estimated showed that government expenditure in the education sector, and PDRB per capita have positively influence to gross enrollment ratios at the high school level in East Lampung. Government expenditure in the education sector have significant influence to the gross enrollment ratios at the high school level in East Lampung.

Keywords: Gross Enrollment Ratios, *Ordinary Least Square* (OLS), PDRB per Capita and Government Expenditure in the Education Sector.

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN
PDRB PER KAPITA TERHADAP ANGKA PARTISIPASI KASAR PADA
JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SEDERAJAT DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh
Richa Susyanthi**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

**Pada
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

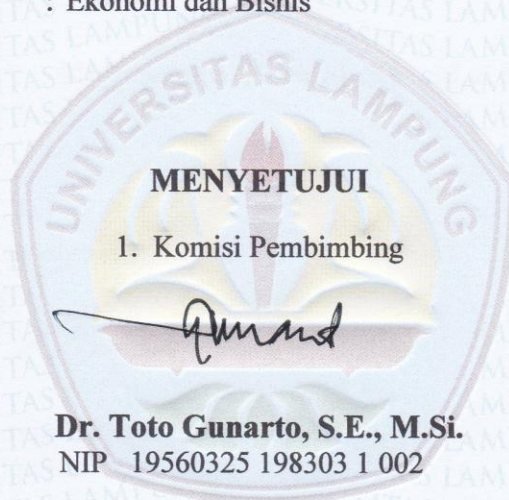
Judul Skripsi : **PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
SEKTOR PENDIDIKAN DAN PDRB PER KAPITA
TERHADAP ANGKA PARTISIPASI KASAR PADA
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SEDERAJAT DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Richa Susyanthi**

No. Pokok Mahasiswa : **1211021098**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

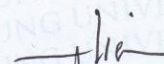
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

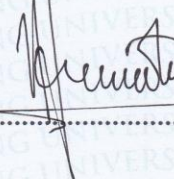
Ketua : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E.




Penguji II : Muhammad Husaini, S.E., M.E.P.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Februari 2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku”

(Richa Susyanthi)

Bandar Lampung, 23 Februari 2017



Richa Susyanthi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Restu Rahayu, pada tanggal 31 Oktober 1994, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Ayah Drs. Nyoman Suwedana, M.Si, dan Mama Made Suwartini

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Restu Rahayu pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Raman Utara tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 4 Metro pada tahun 2012

Tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bissnis Universitas Lampung. Penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu (UKMH) pada tahun 2012 sampai tahun 2014 dan penulis menjadi anggota kewirausahaan. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2015 selama 60 hari di Desa Marga Kencana, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

**“Jangan Pernah merasa gagal sebelum mencoba dan
jangan pernah berhenti sebelum memulainya”**

**“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan usaha dan doa,
karena kesuksesan seseorang tidak akan berubah
dengan sendirinya tanpa adanya usaha”**

(Richa Susyanthi)

“Sreyan sva-dharmo vigunah, para-dharmo bhayavahah”

(Bhagwad Gita III-35)

PERSEMBAHAN

Keberhasilan dalam penyelesaian Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari keluargaku, kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta yang begitu besar jasanya selama hidupku, tanpa kasih sayang, dukungan dan doa kalian mungkin aku tidak bisa menjadi seperti ini.

Ayah tersayang Drs. Nyoman Suwedana, M.Si dan Mama tercinta Made Suwartini yang mempunyai kesabaran tak bisa aku banding, terima kasih atas segala yang telah diberikan, untaian doa yang tak pernah henti di ucapkan demi kesuksesanku. Terima kasih atas nasihat, kasih sayang, serta pengorbanan selama ini di dalam hidupku.

Semoga skripsi ini mampu menjadi salah satu ungkapan kasih sayang dan rasa terima kasihku yang tak terhingga untuk kalian.

Untuk kakakku tersayang Andi Suwandana, S.T terima kasih atas segala dukungan, motivasi, inspirasi dan kasih sayangmu dalam kehidupanku...

Almamater tercinta jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya. Penulis masih bisa menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan PDRB Per Kapita Terhadap Angka Partisipasi Kasar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat di Kabupaten Lampung Timur”* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan, keteladanan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E.,M.S.i. , selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E.,M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas masukan dan saran – sarannya.

4. Bapak Thomas Adrian, S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
Terima kasih atas masukan dan bimbingannya.
5. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak M. Husaini, S.E., M.E.P. selaku dosen penguji yang telah memberikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat untuk penulis.
7. Ibu Dr. Lies Maria Hamzah,S.E., M.E. selaku dosen penguji yang telah memberikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat untuk penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya kepada dosen-dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di Universitas Lampung.
9. Staf Administrasi dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
10. Keluargaku, Ayah dan Mama tercinta serta Kakak dan adik sepupuku tersayang yang tidak pernah kenal lelah untuk selalu member doa dan dukungan demi kesuksesanku.
11. Sahabat terbaik yang selalu menginspirasi dan saling mendukung Emia Sri Kirana, Dwi Kurniasari, Dwi Sarasati, Nuryani S.E, Dewi Anggraini S.E.,
Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Terima kasih untuk semangat, nasihat, saran, pelajaran hidup serta perjuangan susah senang bersama selama ini untuk mampu memperoleh gelar Sarjana.

12. Anak-anak kosan gang kopi 23D, khususnya Nyoman Lia Astuti dan Heni Oktina S.pd, terima kasih atas semangat, motivasi, serta dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat SMAN 4 Metro, Doria Hafni Lubis S.E, Eka Setyawati, Ni'matul Khoiriah, Novi Jayanti Amd.Keb, Yudha Riyantono S.E. terima kasih atas semangat dukungan, motivasi, serta nasihatnya selama penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2012, kadek saint, dewi R, viola, deni, frendi, wayan, orentina, mamet, habibi, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman KKN, Rani, Beby, Ratih, Rama, Rainal. Terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakannya selama di sana serta dukungannya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 23 Februari 2017

Penulis

Richa Susyanthi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Pemikiran 12

F. Hipotesis 14

G. Sistematika Penulisan 14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengeluaran Pemerintah 17

1. Teori Pengeluaran Pemerintah 20

a. Hukum Wegner 20

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	22
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	25
C. Angka Partisipasi Kasar	27
D. Penelitian Terdahulu	29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Data	33
C. Definisi Operasional	34
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisis	36
F. Prrosedur Analisis Data	37
1. Uji Asumsi Klasik	37
a. Uji Normalitas	38
b. Uji Multikolinearitas	39
c. Uji Heteroskedastisitas	40
d. Uji Autokorelasi	41
2. Uji Hipotesis	42
a. Pengujian Secara Bersama-sama (Uji-F)	42
b. Pengujian Secara Parsial/Individu (Uji-t)	44

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Perhitungan	45
1. Analisis Regresi Berganda	45
B. Uji Asumsi Klasik	47
1. Uji Normalitas	47
2. Uji Heterokedastisitas	47
3. Uji Autokorelasi	48
4. Uji Multikolinieritas	49
C. Pengujian Hipotesis	50
1. Uji t Statistik	50
2. Uji F Statistik	51
D. Pembahasan	53

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Pendidikan SMA Sederajat tahun 2010-2015	4
Gambar 1.2. Perkembangan Dana Realisasi Anggaran Pendidikan Kabupaten Lampung Timur tahun 2010-2015	7
Gambar 1.3. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Lampung Timur tahun 2005 – 2015	9
Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran	13
Gambar 2.1. Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Wegner	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, PDRB perkapita dan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Timur	L.1
2. Hasil Regresi Berganda	L.2
3. Hasil Uji Multikolinieritas	L.3
4. Hasil Uji Heterokedastisitas	L.4
5. Hasil Uji Normalitas	L.5
6. Hasil Uji Autokorelasi	L.6

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan bangsa dan negara karena kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini.

Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang akan dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa melihat pada status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Maka pemenuhan atas hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM). (Sulistiyastuti, 2007).

Pasal 31 Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya. Melalui perubahan pasal 31 UUD 1945, adanya ketetapan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Fery, 2002). Namun Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian pasal 49 ayat (1) Undang – Undang

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berujung kepada dimasukkannya gaji guru dalam perhitungan 20 persen anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Jika komponen gaji guru dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya sebesar 11.8 persen. Sedangkan dengan dimasukkan komponen gaji guru, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 dapat mencapai 18 persen. Gerakan Wajib belajar merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan pemerataan pendidikan. Maksud dan tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau. (Fery, 2002).

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indeks yang penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktifitas dan juga lambat nya pertumbuhan ekonomi. Dimana Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang menjadi kabupaten miskin dengan jumlah penduduk miskin berkisar 172,21 juta jiwa pada tahun 2013.(Badan Pusat Statistik).

Indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat seberapa jauh keberhasilan usaha pemerintah di sektor pendidikan, yaitu dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dalam penelitian ini menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mewakili indikator keberhasilan sektor pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu (Sahat, 2011).

Angka Partisipasi Kasar digunakan, untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi masyarakat secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) memiliki peran yang berarti di Indonesia, yaitu untuk mengetahui secara signifikan tingkat penduduk yang menyelesaikan pendidikan yang mana masih menghadapi banyak masalah dalam mengenyam pendidikan seperti putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Kemudian peran yang lain adalah untuk mengetahui jika tingginya suatu jenjang pendidikan maka akan berpengaruh terhadap semakin rendah tingkat angka partisipasinya, untuk mengetahui pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, contohnya belum tersedianya fasilitas pendidikan untuk masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional dan yang memiliki bakat istimewa yang belum mempunyai tempat untuk menyalurkan bakatnya (Sahat, 2011).

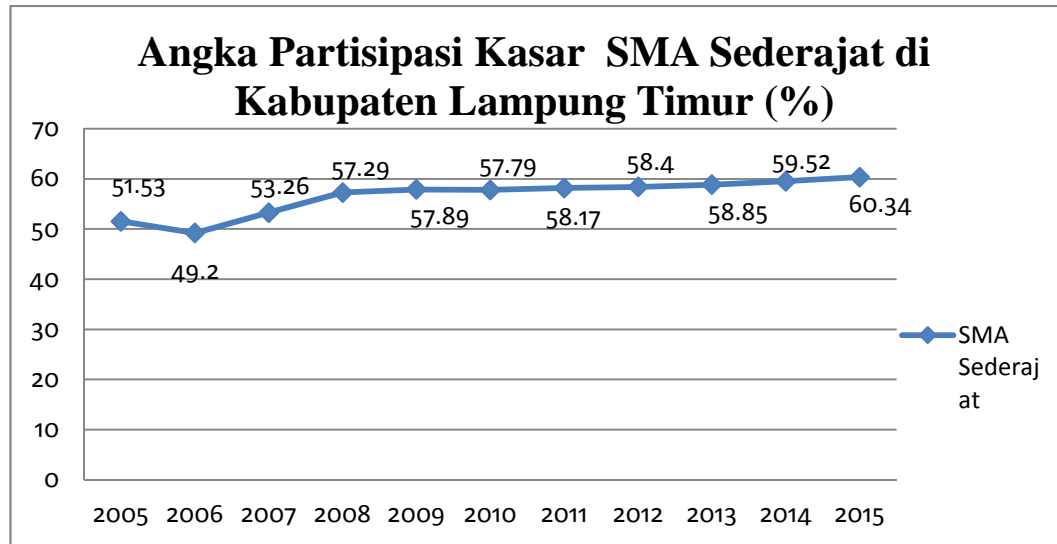
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Hal ini berarti APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya, dan sebaliknya. Pendidikan merupakan kebutuhan sentral yang harus didukung penuh oleh seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dimana salah satu masalah dalam dunia pendidikan adalah tingkat melanjutkan anak usia sekolah yang belum optimal sesuai dengan harapan pemerintah. (Yoto, 2011).

Hal tersebut dapat kita lihat dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) di beberapa daerah yang masih mengalami permasalahan tersebut. Dimana kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten yang mengalami permasalahan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Lampung Timur tingkat pendidikan SMA Sederajat dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

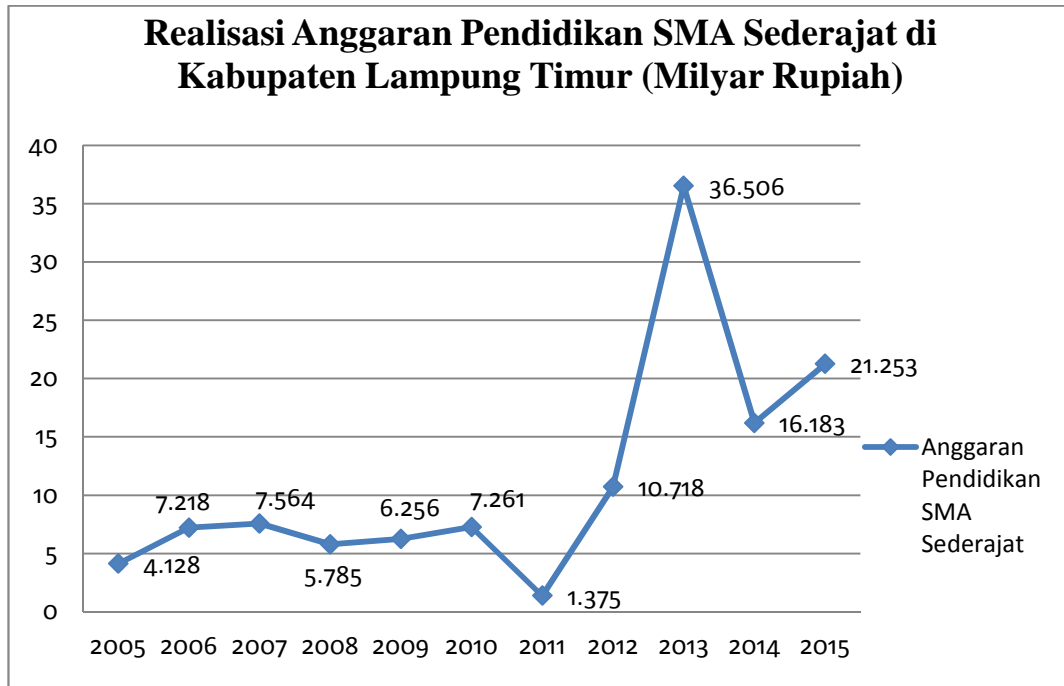
Gambar 1.1 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat pendidikan SMA Sederajat tahun 2005 – 2015.

Berdasarkan gambar di atas jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat di kabupaten Lampung Timur terjadi fluktuasi yang mana pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 2.33 persen dari tahun 2005 sebesar 51.53 persen dan kembali meningkat sampai tahun 2015 sebesar 60.34 persen dimana setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1.24 persen dari tahun 2005-2015. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di kabupaten Lampung Timur dinilai masih rendah, rata-rata Angka Partisipasi Kasar masih di bawah 90 persen, dan masih jauh untuk target secara nasional sebesar 95 persen, yang mana target tersebut untuk wajib belajar 9 tahun tetapi ini dapat menggambarkan kondisi pada

jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat juga perlu mendapat perhatian sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang direncanakan. (Amanda, 2010).

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi angka melanjutkan sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas antara lain disebabkan oleh faktor partisipasi, faktor status sosial ekonomi, faktor budaya, faktor motivasi, dan faktor kebijakan public, anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat, dan kesehatan. (Suyanto, 2001). Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas rendahnya partisipasi bisa disebabkan oleh tingginya biaya yang dibebani yaitu berupa biaya : biaya-biaya langsung pendidikan individual (ongkos, buku, uang seragam, dll.) dan biaya-biaya yang tidak langsung. Secara tidak langsung seorang anak yang sudah mencapai umur dimana sudah dapat memberikan sumbangan kepada penghasilan keluarga akan memilih untuk bekerja dari pada untuk memperoleh pendidikan, hal ini sangat berkaitan dengan masih rendahnya pendapatan atau penghasilan keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin besar biaya pendidikan yang akan dikeluarkan. (Michael P.Todaro, 2000).

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Gambar 1.3. Perkembangan Dana Realisasi Anggaran Pendidikan tingkat SMA kabupaten Lampung Timur tahun 2005 – 2015.

Anggaran pendidikan kabupaten Lampung Timur mengalami fluktuasi.

Dimana anggaran pendidikan tersebut di alokasikan sebagai berikut:

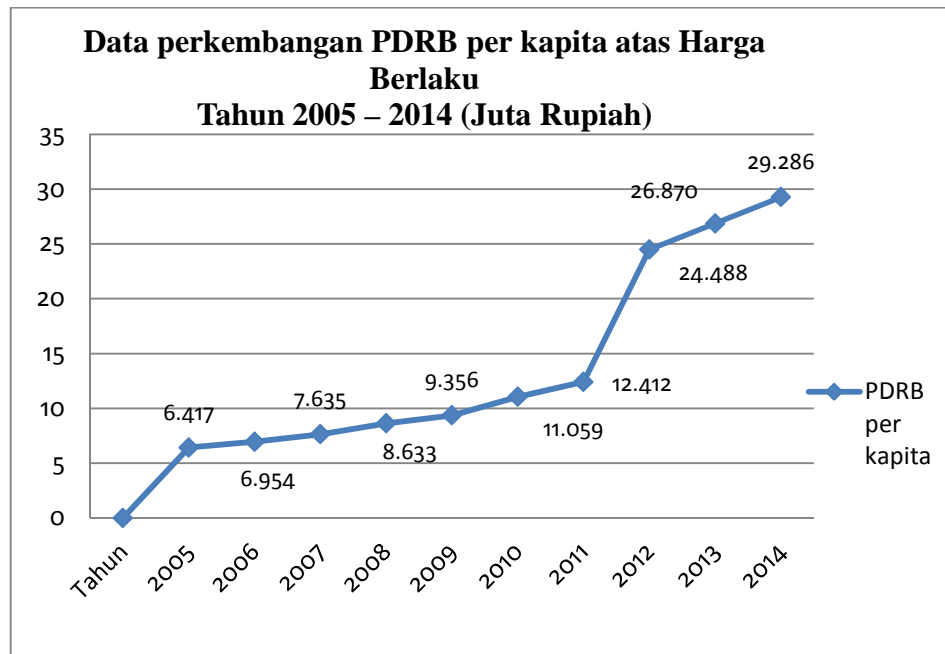
- a. Peningkatan sarana pendidikan teknologi dan komunikasi pada jenjang pendidikan.
- b. Peningkatan sarana kewirausahaan siswa SMK.
- c. Peningkatan kompetensi pustakawan dan laboran jenjang SMA.
- d. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas dan kelulusan siswa SMK pada ujian praktik.

- f. Penyelenggaraan paket C setara SMA.
- g. Peningkatan kompetensi siswa melalui penyelenggaraan OSN
(*Olimpiade Sains Nasional*)
- h. Peningkatan kompetensi siswa SMK

Peningkatan anggaran pada sektor pendidikan yang dikeluarkan pemerintah belum dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi semakin menurun. Hal ini dikarenakan tingginya biaya pendidikan yang pada akhirnya mempengaruhi penurunan mutu pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan ketentuan anggaran pendidikan 20 % dari keseluruhan anggaran negara (APBN). Penerapan Anggaran pendidikan 20 % dari APBN yang dilakukan pemerintah, membuka harapan untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. (Norton, 2002).

Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun Produk Domestik Bruto, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan. Secara tidak langsung hal itu menunjukkan seberapa jauh masyarakat menyadari pentingnya peranan pendidikan.

Berikut data Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan Harga Berlaku dari tahun 2005 – 2014:



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3: Perkembangan PDRB perkapita atas harga berlaku tahun 2005 – 2014 (juta rupiah) kabupaten Lampung Timur.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro (Pratiwi, 2014).

Pertumbuhan PDRB perkapita kabupaten Lampung Timur tiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2.541 juta rupiah. PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Sehingga berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan masyarakat di kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari jumlah PDRB per kapita. PDRB per kapita penduduk pada suatu daerah dihasilkan dengan membagi pendapatan

domestik dan jumlah penduduk pertengahan tahun di daerah bersangkutan. (Norton, 2002).

Tingkat PDRB perkapita yang tinggi diharapkan masyarakat mampu memprioritaskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dimana dengan tingginya jenjang pendidikan mampu memperoleh kualitas SDM yang lebih baik sehingga menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.

B. Rumusan Masalah

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan orang banyak. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian. Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Salah satu pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran pada sektor pendidikan. Dimana anggaran pendidikan dapat mempengaruhi jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Dimana jumlah APK kabupaten Lampung Timur belum mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional sebesar 95 persen, walaupun target tersebut untuk wajib belajar 9 tahun tetapi ini dapat menggambarkan kondisi pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat juga perlu mendapat perhatian sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang akan di canangkan.

Tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat APK di kabupaten Lampung Timur. Dimana untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah tersebut masyarakat harus memiliki tingkat PDRB per kapita yang cukup agar mampu melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas tulisan ini bertujuan untuk meneliti :

- a. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Lampung Timur.
- b. Bagaimana pengaruh PDRB per Kapita terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Lampung Timur.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB per Kapita terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

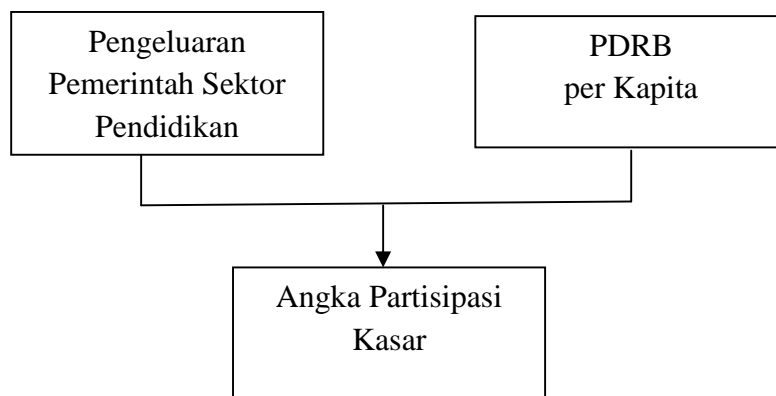
Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat, bagi peneliti maupun orang lain. Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan PDRB per kapita terhadap angka partisipasi kasar pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di kabupaten Lampung Timur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang dituangkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk subsektor sosial yang terangkum dalam belanja modal. Besarnya pengeluaran tersebut mengindikasikan besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia. Dalam alokasi belanja modal dan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dimaksudkan untuk mengatasi masalah rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK). Dengan peningkatan anggaran pemerintah diharapkan mampu untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar.

Tingkat pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Tingginya biaya pendidikan menjadi salah satu masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk mengatasi tingginya biaya pendidikan diperlukan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup baik. Dimana untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diketahui melalui PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara makro. PDRB per kapita menunjukkan kemampuan masyarakat yang dapat digunakan untuk meringankan biaya pendidikan dan akan meningkatkan tingkat Angka Partisipasi Kasar.



Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1: Diduga terdapat pengaruh yang positif antara Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Lampung Timur (H_1).

Hipotesis 2 : Diduga terdapat pengaruh yang positif antara PDRB per kapita terhadap Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Lampung Timur (H_2).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini disusun dalam 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, PDRB per kapita, terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA di kabupaten Lampung Timur. Latar belakang ini kemudian menjadi dasar bagi perumusan masalah pada bagian selanjutnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan variabel PDRB per kapita terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA di kabupaten Lampung Timur.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang berisikan landasan-landasan teori yang menjadi dasar dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang relevan sehingga mendukung tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengeluaran pemerintah. Pada BAB II ini juga akan dijelaskan penelitian terdahulu yang merupakan dasar pengembangan penulisan penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait. Metode analisis yang digunakan adalah Metode Kuadrat Terkecil (Ordinary Least Square/OLS). Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linier sederhana dengan jenis data runtun waktu (*time series*) yang diolah melalui Eviews 6.0.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menguraikan deskripsi objek penelitian yang memuat rincian sampel dari data yang telah dikumpulkan. Bab ini juga memuat analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan. Bagian selanjutnya, yaitu interpretasi hasil, menjelaskan hasil penelitian secara komprehensif.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2001). Dasar teori pengeluaran pemerintah adalah dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yaitu : $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional. Dalam mengalokasikan pengeluaran, pemerintah harus melakukan banyak pertimbangan, karena pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi harus mempertimbangkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Meningkatkan pengeluaran pemerintah bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus memperhitungkan siapa saja yang akan meningkat pendapatannya. Pemerintah juga perlu

menghindari agar peningkatan peran dalam perekonomian tidak melemahkan pihak swasta. (Dumairy, 1996)

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam – macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut:

a. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang - barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari – hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkosoebroto, 1994).

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian. Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera.

Menurut Dumairy (1999) Pemerintah memiliki peran yaitu :

- a. Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- b. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- c. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *equilibrium*.

1. Teori Pengeluaran Pemerintah

a. Hukum Wegner

Adolf Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian yang cenderung meningkat yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. (Dumairy, 1996).

Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, yaitu sebagai berikut: apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesobroto, 2001)

Hukum tersebut dapat diformulasikan dengan rumus:

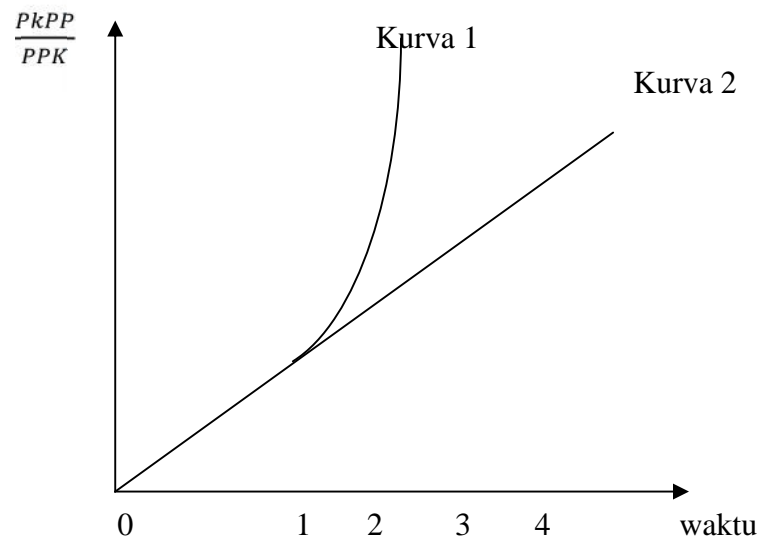
$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

Keterangan:

$PkPP$ = Pengeluaran pemerintah perkapita.

PPK = Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk.

1,2, ..., n = Jangka waktu (tahun).



Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Wegner

Menurut Kumar dalam Setyopurwanto (2013) modal manusia sangat berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan yang terkandung pada manusia yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang akan berguna dalam produksi barang, jasa dan pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Oleh karena itu salah satu kunci utama dari modal manusia adalah pendidikan yang dilengkapi

oleh faktor lain diantaranya kesehatan, lingkungan kerja, dan faktor lainnya.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan

Menurut Michael P. Todaro (2000) ada dua biaya pendidikan, yaitu; biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mahmudi, 2007).

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dimana pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat guna memajukan tingkat kualitas sumber daya manusia pada saat ini yaitu pendidikan dasar. Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu

cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan.

(Mahmudi, 2007).

Menurut Achsanah dalam Rica Amanda, (2010) bahwa Peranan dominan pemerintah terhadap pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan, karena karakteristik yang ada pada sektor pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran pendidikan sebagai investasi

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan mencerminkan investasi dalam sumber daya manusia. Karakteristik khusus dari pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan adalah dampaknya yang tidak secara langsung dapat dilihat. Misalnya, pengeluaran pemerintah dalam program wajib belajar 9 tahun tidak serta merta dapat di rasakan tapi membutuhkan waktu misalnya 5 atau 10 tahun ke depan. Dan Menurut Almasdi Syahza dalam Model Pengembangan wajib belajar 12 tahun, Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang perlu diutamakan, yaitu: Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk

perkembangan ekonomi. Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.

Ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda.

2. Pengeluaran Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Publik.

Adanya kegagalan pasar serta eksternalitas positif dari pendidikan mendorong pentingnya intervensi pemerintah dalam bidang pendidikan dalam kerangka untuk meningkatkan efisiensi serta untuk mendistribusikan pendidikan ke seluruh lapangan masyarakat

3. *Rate Of Return* Pendidikan

Rate of return investasi dalam bidang pendidikan sangat tinggi terutama untuk negara-negara berkembang maupun negara miskin dimana *supply* tenaga terdidik relatif masih sangat sedikit.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas, sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang.

PDB/PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Dalam menghitung tingkat PDRB terdapat metode perhitungan tidak langsung/alokasi, dimana metode tidak langsung dilakukan dengan menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. Sehingga untuk dapat mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk pada suatu daerah secara rata-rata dapat digunakan dengan angka PDRB per kapita.

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di daerah bersangkutan. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. Tingginya PDRB per kapita mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dan sebaliknya PDRB per kapita yang rendah mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang kurang berkembang. Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk biaya pendidikan, dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan menjadi lebih tinggi, sehingga permintaan akan jenjang pendidikan menjadi lebih tinggi dan waktu sekolah pun menjadi lebih lama (Susanti, 1995).

Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas tenaga kerja dengan asumsi semakin tinggi kualitas dan mutu pendidikan, maka akan semakin tinggi produktivitas tenaga kerja dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini selanjutnya mengungkapkan bahwa produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan masyarakat lebih tinggi karena pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Susanti, 1995).

Menurut Michael P.Todaro (2000) ada dua biaya pendidikan, yaitu: biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan perkapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah semua biaya yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan. Biaya-biaya ini meliputi uang iuran sekolah, buku-buku, pakaian seragam, serta ongkos lainnya. Tingkat permintaan terhadap pendidikan berbanding terbalik dengan besarnya ongkos-ongkos yang bersifat langsung ini, dan semakin tingginya jenjang pendidikan yang diterima seorang anak maka semakin besar ongkos/biaya pendidikan langsung individual yang dibebani. Bagi penduduk yang berpenghasilan rendah, biaya-biaya langsung dari penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar sudah membebankan mereka dengan menghabiskan jumlah pendapatan riil mereka yang cukup besar.

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pendidikan merupakan suatu cara untuk meningkatkan pengetahuan dengan menyatukan insting, pikiran, dan pengalaman manusia, sehingga bisa menciptakan sesuatu menjadi lebih sempurna dan berbudaya. Pendidikan seperti ini bersifat natural yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri dan tidak perlu dipelajari terlebih dahulu. Mendidik dapat juga dikatakan membudayakan manusia (Made Dwi, 2009). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang

pendidikan tertentu. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Meningkatnya partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan.

D. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode dan Variable	Hasil
1	Yoto (2011)	Faktor – factor penyebab rendahnya angka melanjutkan sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (studi kasus di kec. cikedung dan kec. sukra, kab. Indramayu	Metode yang digunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan pengumpulan data skunder.	Penyebab utama dari tingginya partisipasi anak yang tidak melanjutkan sekolah adalah factor ekonomi. Adapun factor lainnya yaitu daya saing, social, minat, motivasi, tidak signifikan sebagai penyebab utama permasalahan .

2	Rahmat Adhierianto (2014)	Analisis Pengaruh DAU, DAK dan Pendapatan Perkapita Terhadap Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2003-2008	Metode <i>random effect model</i> (REM) Variabel independen: DAU, DAK, PDRB Perkapita Variabel Dependen: Angka Partisipasi Kasar (APK)	Hasil penelitian bahwa DAU dan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap APK tingkat Sekolah Dasar.
3	Muhammad Ikhwan (2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Pdrb Per Kapita Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Provinsi Aceh	Variabel Dependen: angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah, Variabel independen: pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita. Metode yang digunakan: Random Effect Model	Variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka melek huruf. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). PDRB per Kapita juga berpengaruh positif dan tidak signifikan

				terhadap angka partisipasi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan untuk angka partisipasi sekolah menengah atas (SMA) berpengaruh positif dan signifikan.
4	Mamay Sukaesih (2008)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akses Pendidikan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 1995-1997 dan 2003-2006)	<p>Model yang digunakan dalam penelitian ada 2, yaitu:</p> <p>Model Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan</p> $eduspend_{it}=f(dak_{it},dau_{it},ycap_{it},ddes)$ <p>Model Akses Pendidikan</p> $Ger=f(eduspend_{it},ilterate_{it},ycap_{it},ddes)$	<p>DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>DAK berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat, daripada DAK</p>

				<p>Pendidikan.</p> <p>Tingkat akses pendidikan masyarakat juga lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat</p>
--	--	--	--	---

III. METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif terdiri atas perumusan masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, dan menginterpretasikan hasil. (Sugiono, 2008).

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data runtun waktu (*time series*) 10 tahun dari tahun 2005 – 2014. Data diperoleh dari publikasi resmi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dinas pemuda dan olahraga kabupaten Lampung Timur serta data lain yang mendukung penelitian ini diperoleh dari sumber bacaan seperti jurnal, situs atau website resmi dan buku bacaan.

Tabel 1. Spesifikasi Batasan Variabel

No	Nama Variabel	Simbol	Satuan	Satuan	Sumber Data
1	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	PP	Milyar Rupiah	Tahun	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Angka Partisipasi Kasar	APK	Persen	Tahun	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	PDRB Perkapita	PDRB	Juta Rupiah	Tahun	BPS Lampung

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMA (Y)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing tingkat pendidikan. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan APK tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) APK tingkat SMA dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$APK_{15-17} = \frac{\sum \text{penduduk usia 15-17 tahun masih bersekolah}}{\sum \text{penduduk yang berumur 15-17 tahun}} \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan APK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). APK pada jenjang pendidikan SMA (Y) adalah proporsi jumlah siswa berapapun usia, yang sedang sekolah di jenjang pendidikan SMA terhadap usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SMA yang dinyatakan dalam persen (%).

b. Pengeluaran Pemerintah (X1)

Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan (X1) adalah alokasi anggaran pada sektor pendidikan yang dianggarkan melalui APBD dan alokasi anggaran pendidikan yang kemudian di transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik yang dinyatakan dalam milyar (Rp).

c. Pendapatan Perkapita (X2)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita. Pendapatan regional perkapita digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto perkapita yang dihitung menurut harga yang berlaku (PDRB ADHB). PDRB ADHB digunakan karena menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Berbeda dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

ekonomi daerah tersebut. PDRB per kapita (X_2) adalah total PDRB provinsi Lampung dibagi jumlah penduduk provinsi Lampung untuk tahun yang sama yang dinyatakan dalam jutaan (Rp).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari buku-buku terbitan instansi terkait, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui perpustakaan dan *download* internet.

E. Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variable independen secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap variable dependen. Hubungan fungsional antara satu variable dependen dengan variable independen dapat dilakukan dengan regresi berganda dan menggunakan *time series*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan model sebagai berikut:

$$APK = f (PP, INCOME)$$

Fungsi tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam model umum persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \mu_t$$

Model regresi berganda semi log pada penelitian ini yaitu:

$$APK_t = \beta_0 + \beta_1 \ln PP_t + \beta_2 \ln INCOME_t + \mu_t$$

Keterangan :

APK_t = Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SMA (%)

$\ln PP_t$ = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan (%)

$\ln INCOME_t$ = PDRB per kapita (%)

β_0 = *intercept*

β_1, β_2 = koefisien regresi

μ_t = *term error* (kesalahan pengganggu).

\ln = Logaritma natural

F. Prosedur Analisis Data

Untuk menguji persamaan regresi dari model diatas maka digunakan beberapa pengujian sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan aumsi klasik. Menurut Gujarati (2006) bahwa beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk suatu hasil estimasi agar dapat dikatakan baik dan efisien yaitu:

- Model regresi adalah linear.
- Tidak ada multikolinearitas.
- *Error term* harus terdistribusi normal atau stokastik.
- Homokedasrisitas atau varians dari variabel pengganggu adalah konstan.
- Jumlah data harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah parameter yang akan diestimasi.
- Residual variabel pengganggu mempunyai rata-rata nol.
- Tidak ada autokorelasi antara variabel pengganggu.
- Kovarian antara variabel pengganggu dan variabel independen (X_1) adalah nol.

Berdasarkan keadaan tersebut di dalam ilmu ekonometrika, agar suatu model dikatakan baik dan efisien maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam software EViews normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera (JB) dan nilai Chi Square tabel. Uji JB didapat dari histogram normality yang akan kita bahas dibawah ini. Hipotesisi yang digunakan adalah:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian heterokedastisitas adalah :

- H_0 ditolak, jika nilai probabilitas $< 5\%$. Artinya bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B tidak sama dengan nol.
- H_0 diterima, jika nilai probabilitas $> 5\%$. Artinya bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B mendekati nol.

b. Uji Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem multikolinieritas. Untuk menguji ada atau tidaknya masalah multikolinearitas dapat kita lakukan melalui correlation common sample dengan tolak ukur koefisien korelasi maksimum 0,85(Widarjono, 2009).

Multikolinearitas merupakan hubungan linear antara variabel-variabel bebas di dalam suatu regresi. Menganalisis ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian maka metode yang digunakan adalah korelasi parsial antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi di atas 0,85 maka model mengandung multikolinieritas tetapi, jika nilai

koefisien kurang dari 0,85 maka model tidak mengandung multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi saat error-term mempunyai koefisien yang tidak sama. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam suatu regresi, maka Dalam pengujian heterkedastisitas uji *White* merumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat heterokedastisitas

Ha : Terdapat heterokedastisitas

Kriteria pengujian heterkedastiitas adalah :

- Ho ditolak, jika nilai Obs*R square (χ^2 hitung) > tabel. Maka terdapat masalah heterkedastisitas.
- Ho diterima, jika nilai Obs*R square (χ^2 hitung) < tabel. Maka tidak ada masalah heterokedastisitas.

Selain itu dapat dilihat juga apabila nilai probabilitas Obs*R square lebih besar dari (5%) maka data bersifat heteroskedastisitas.

Sebaliknya bila probabilitas Obs*R square lebih kecil dari (5%) maka data bersifat tidak heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan antara observasi dengan observasi lainnya dalam model tersebut dalam *time-series* maupun crosssection. Untuk mendeteksi autokorelasi, terdapat metode yaitu: Dalam Metode Breusch-Godfrey, Otokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Apabila dihubungkan dengan metode OLS, otokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain (Widarjono, 2007). Metode yang digunakan untuk mengetahui masalah autokorelasi dalam model penelitian ini adalah metode Breusch-Godfrey atau yang sering disebut dengan Lagrange Multiplier Test (LM test). Langkah yang dilakukan untuk mendeteksi adanya otokorelasi menurut Breusch-Godfrey LM Test adalah sebagai berikut (Widardjono, 2007):

1. Estimasi persamaan regresi dengan metode OLS dan dapatkan residualnya.
2. Melakukan regresi residual e_t dengan variabel bebas X_t (jika ada lebih dari satu variabel bebas maka harus memasukkan semua variabel bebas) dan lag dari residual $e_{t-1}, e_{t-2}, \dots, e_{t-p}$. Kemudian dapatkan R^2 dari regresi persamaan tersebut.

3. Jika sampel besar, maka model dalam persamaan akan mengikuti distribusi Chi-squares dengan df sebanyak p. Nilai hitung statistik Chisquares dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$(n - p) R^2 \quad 2p$$

Jika $(n - p) R^2$ yang merupakan Chi-squares (χ^2) hitung lebih besar dari nilai kritis Chi-squares (χ^2) pada derajat kepercayaan tertentu (α), ditolak hipotesis (H_0). Ini menunjukkan adanya masalah otokorelasi dalam model. Sebaliknya jika Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai kritisnya maka diterima hipotesis nol. Artinya model tidak mengandung unsur otokorelasi karena semua p sama dengan nol.

2. Uji Hipotesis

a. Pengujian Secara Parsial / Individu (Uji – t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan menganggap variabel bebas lainnya tetap (ceteris paribus). Pengujian ini dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabel sesuai dengan tingkat signifikansi tertentu.

Berikut adalah perumusan hipotesis dalam uji-t statistik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. $H_0: \beta_1=0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Angka Partisipasi Kasar

 $H_a: \beta_1 > 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap variabel Angka Partisipasi Kasar

2. $H_0: \beta_2=0$, artinya variabel PDRB perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Angka Partisipasi Kasar.

 $H_a: \beta_2 > 0$, artinya variabel PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap variabel Angka Partisipasi Kasar.

Kriteria Pengujian Uji t :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Pengujian Secara Bersama-sama (Uji – F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya, Dengan derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%, apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi F dengan cara membandingkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan F-tabelnya, Perumusan hipotesis :

1. Apabila $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.
2. Apabila $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh anggaran pendidikan dan PDRB perkapita terhadap APK pada jenjang SMA di kabupaten Lampung Timur, sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap APK pada jenjang SMA, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Dimana proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan. Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan akan mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan suatu pendidikan.
2. PDRB perkapita terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap APK pada jenjang SMA, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Dimana PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka akan meningkatkan tingkat kesadaran untuk meningkatkan taraf pendidikan dan mampu meningkatkan sumber daya manusia.

B. Saran

Adapun saran - saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan perlu di tingkatkan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah kabupaten Lampung Timur sehingga akan tetap berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Kasar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
2. Wajib Belajar 9 tahun sudah harus diperbaharui menjadi wajib belajar 12 tahun karena kondisinya APK pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar tetapi masih banyak yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi hal ini terlihat pada rendah APK Sekolah Menengah Atas.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus tetap menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama pendidikan lanjutan. Sehingga dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mampu meningkatkan kualitas masyarakat dalam menghadapi dunia kerja, karena dengan kualitas yang lebih baik akan mempermudah seseorang untuk memperoleh suatu pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhierianto, Rahmat. 2014. Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2003-2008
- Amanda, Rica. 2010. *Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan Dalam Implementasi Model Kota Layak Anak*. Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik. *Lampung Timur Dalam Angka*. Berbagai Terbitan
- Berdikari. (2012). Angka Partisipasi Pendidikan.
<http://www.berdikarionline.com/editorial/20120714/angka-partisipasi-sekolah.html>. Retrieved September 29, 2014, from Berdikari Online.com
- Bustomi, Muhammad Ja'far. 2012. Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota Dan Implikasinya Di Provinsi Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Indonesia.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur
- Dumairy (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Fery. 2002. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Atiah. 2009. "Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". *Tesis*, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.

- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda Akhmad Noval, Hadi Sasana. 2013. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap *Outcomes* Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta). Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ikhwan Muhammad. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Pdrb Per Kapita Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Provinsi Aceh. Fakultas Ekonomi. Universitas Syiah Kuala Darussalam. Banda Aceh.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mangkoesebroto Guritno (2001), *Ekonomi Publik Edisi ke – 3*, Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
- Muhammad Ja'far Bustomi.2012. “Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota Dan Implikasinya Di Provinsi Jawa Tengah”. Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Mohamad Erhan Wibowo. 2014. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro,Semarang.
- Nazamuddin. 2013. Kontribusi Pendidikan Terhadap Pembangunan Ekonomi : Kasus Provinsi Aceh. Fakultas Ekonomi. Universitas Syiah Kuala. Kopelma Darussalam Banda Aceh
- Ni Made Myanti Astrini A, Ida Bagus Putu Purbadharmaja. “Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana
- Norton, Seth. 2002. Economic Growth And Poverty: In Search of Trickle-Down. *Cato Journal*, 22(2): pp: 263-275.
- Pratiwi, Seruni dan Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, Dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali.

- Rahmat Adhierianto.2014. “Analisis Pengaruh DAU, DAK dan Pendapatan Perkapita Terhadap Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2003-2008”. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Sahat, Henry. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat (Studi Kasus Kabupaten Deli Serdang). Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono, P. Dr. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
- Sukaesih, Mamay. 2008. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akses Pendidikan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 1995-1997 dan 2003-2006). Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2007. *Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis*. Yogyakarta.
- Susanti, Widyanti dan Ikhsan. 1995. *Indikator-Indikator Makro ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Suyanto, dan Abas. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.
- Todaro Michael P dan Smith Stephen C (2000), *Pembangunan Ekonomi* Edisi ke – 9, Penerbit Erlangga.
- Waridin, dan Johanna Maria. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis , Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widarjono, A. 2007. *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia

Yoto. 2011. Faktor – Faktor Penyebab Rendahnya Angka Melanjutkan Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus Di Kec. Cikedung dan Kec. Sukra, Kab. Indramayu). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=565>

[http://www.beritasatu.com/kesra/359790-ini-penyebab-utama-rendahnya-anggaran-
pendidikan-daerah.html](http://www.beritasatu.com/kesra/359790-ini-penyebab-utama-rendahnya-anggaran-pendidikan-daerah.html)

www.bps.go.id

<http://sirusa.bps.go.id>

<https://lampungtengahkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/21>